

SALINAN  
NOMOR 78/2019

PERATURAN WALIKOTA MALANG  
NOMOR 78 TAHUN 2019  
TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA  
TATA KERJA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
13. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 41);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan



sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.

10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
11. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
12. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas bendahara umum daerah.
13. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah surat yang mencakup jumlah anggaran yang akan diserap dalam 1 (satu) tahun anggaran.
14. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM).
15. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau perolehan lainnya yang sah.
16. Pengelola BMD adalah Sekretaris Daerah sebagai pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
17. Pejabat Penatausahaan Barang adalah Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi pengelolaan BMD selaku PPKD.
18. Pengelola investasi pemerintah daerah selanjutnya disebut pengelola investasi adalah pejabat pengelola keuangan daerah selaku BUD.
19. Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan BMD.
20. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan

fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

## BAB II KEDUDUKAN

### Pasal 2

- (1) BKAD merupakan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, berkedudukan di bawah Walikota.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris dan berkedudukan di bawah BKAD.
- (3) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang dan berkedudukan di bawah BKAD.
- (4) Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian dan berkedudukan di bawah Sekretariat.
- (5) Subbidang dipimpin oleh Kepala Subbidang dan berkedudukan di bawah Bidang.

## BAB III SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi BKAD, terdiri dari:
  - a. Sekretariat, terdiri dari:
    1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
    2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Bidang Anggaran dan Perbendaharaan, terdiri dari:
    1. Subbidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran;
    2. Subbidang Administrasi Anggaran; dan
    3. Subbidang Perbendaharaan;
  - c. Bidang Akuntansi dan Penatausahaan Aset Daerah, terdiri dari:
    1. Subbidang Akuntansi dan Pelaporan;
    2. Subbidang Pendataan Aset Daerah; dan

3. Subbidang Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian Aset Daerah;
  - d. Bidang Pemanfaatan Aset Daerah, terdiri dari:
    1. Subbidang Penggunausahaan Aset Daerah;
    2. Subbidang Pemindahtanganan dan Penghapusan Aset Daerah; dan
    3. Subbidang Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Daerah;
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

##### Bagian Kesatu BKAD

##### Pasal 4

- (1) BKAD mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan pengelolaan BMD yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BKAD menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan di bidang keuangan dan pengelolaan BMD;
  - b. penyusunan perencanaan strategis dan rencana kerja tahunan;
  - c. fasilitasi penyusunan KUA dan PPAS beserta perubahannya;
  - d. penyusunan rancangan APBD beserta perubahannya;
  - e. pelaksanaan fungsi BUD;
  - f. penyusunan Naskah Perjanjian Hibah Daerah dalam bentuk uang yang dalam kewenangannya BKAD;
  - g. pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya;

- h. penyusunan laporan keuangan Daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- i. pelaksanaan fungsi Pejabat Penatausahaan Barang;
- j. pelaksanaan fungsi pengelola investasi sesuai kewenangan dan tanggung jawab yang telah dilimpahkan;
- k. pemanfaatan tanah dan/atau bangunan milik Pemerintah Daerah yang tidak dalam penguasaan pengguna barang;
- l. pemanfaatan dan penatausahaan tanah dan/atau bangunan negara yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah;
- m. pengoordinasian penyelesaian sengketa pemanfaatan BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak dalam penguasaan pengguna barang;
- n. pelayanan pemakaian kekayaan Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang menjadi kewenangannya;
- o. pemungutan retribusi Daerah yang menjadi kewenangannya;
- p. pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- q. pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
- r. pelaksanaan administrasi di bidang keuangan dan pengelolaan BMD;
- s. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan dan pengelolaan BMD; dan
- t. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota di bidang keuangan dan pengelolaan BMD yang dalam kewenangannya.

Bagian Kedua  
Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, dan mengendalikan kegiatan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan kepustakaan serta kearsipan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan program Sekretariat berdasarkan perencanaan Strategis;
  - b. pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, dan anggaran;
  - c. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan;
  - d. pelaksanaan program Sekretariat;
  - e. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip, dan dokumentasi serta kerja sama di lingkungan BKAD;
  - f. pelaksanaan ketatalaksanaan dan hubungan masyarakat serta bahan publikasi;
  - g. pengoordinasian pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta kinerja pengadaan barang/jasa;
  - h. pengelolaan barang milik daerah yang menjadi kewenangan BKAD;
  - i. pelaksanaan survei kepuasan masyarakat;
  - j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Sekretariat; dan
  - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 1  
Subbagian Perencanaan dan Keuangan

Pasal 6

- (1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta penyiapan bahan administrasi keuangan dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:
  - a. perencanaan kegiatan dan anggaran Subbagian Perencanaan dan Keuangan berdasarkan program Sekretariat;
  - b. pelaksanaan penatausahaan keuangan;
  - c. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana strategis, rencana kerja, program, kegiatan dan anggaran;
  - d. pelaksanaan pengumpulan dan evaluasi rencana kegiatan dan anggaran, perjanjian kinerja, pelaporan capaian kinerja;
  - e. penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan akuntansi keuangan;
  - f. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan termasuk penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan;
  - g. penyiapan bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan;
  - h. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
  - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2  
Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 7

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi umum meliputi ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kerja sama, hubungan masyarakat, rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi, perpustakaan dan kearsipan serta pengelolaan administrasi kepegawaian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
  - a. perencanaan kegiatan dan anggaran Subbagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan program Sekretariat;
  - b. penyiapan bahan pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, penggandaan naskah-naskah dinas, kearsipan dan perpustakaan;
  - c. penyiapan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga dan keprotokolan;
  - d. penyiapan bahan pelaksanaan tugas di bidang hubungan masyarakat;
  - e. penyiapan bahan penyusunan perencanaan kebutuhan kepegawaian mulai penempatan formasi, pengusulan dalam jabatan, usulan pensiun, peninjauan masa kerja, pemberian penghargaan, kenaikan pangkat, sasaran kinerja pegawai, daftar urut kepangkatan, sumpah/janji aparatur sipil negara, gaji berkala, kesejahteraan, mutasi dan pemberhentian pegawai, diklat, ujian dinas, izin belajar, pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai;
  - f. penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan kebutuhan perlengkapan, pengadaan, perawatan, serta pengamanan perlengkapan dan aset;



- g. penyiapan bahan pelaksanaan pengadministrasian aset dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas barang-barang inventaris;
- h. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi pemanfaatan dan penghapusan serta penatausahaan barang milik daerah;
- i. penyusunan standar pelayanan dan standar operasional prosedur;
- j. pelaksanaan layanan pengaduan masyarakat di bidang pelayanan keuangan dan barang milik daerah pada pengguna barang;
- k. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga  
Bidang Anggaran dan Perbendaharaan

Pasal 8

- (1) Bidang Anggaran dan Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan program dan kegiatan di bidang manajemen pengelolaan Anggaran Daerah dan penyelenggaraan perbendaharaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Anggaran dan Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan program Bidang Anggaran dan Perbendaharaan berdasarkan perencanaan Strategis BKAD;
  - b. perumusan kebijakan pengelolaan anggaran Daerah dan penyelenggaraan perbendaharaan;
  - c. pengoordinasian penyusunan RKA/DPA SKPD dan/atau RKA-P/DPPA SKPD;
  - d. fasilitasi penyusunan rancangan KUA dan PPAS berikut perubahannya;

- e. penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan Walikota tentang penjabaran APBD beserta perubahannya;
- f. penyusunan rancangan peraturan Walikota tentang teknis penyusunan anggaran Perangkat Daerah;
- g. penyusunan kajian investasi daerah dalam rangka penyertaan modal;
- h. pengoordinasian perencanaan anggaran pendapatan dalam rangka penyusunan APBD dan perubahan APBD;
- i. pengoordinasian perencanaan anggaran belanja daerah dalam rangka penyusunan APBD dan perubahan APBD;
- j. pengoordinasian perencanaan anggaran pembiayaan dalam rangka penyusunan APBD dan perubahan APBD;
- k. pelaksanaan fungsi Kuasa BUD;
- l. pengoordinasian pemberian pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan gaji dan non gaji, serta penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP);
- m. pengoordinasian penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyeteroran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK);
- n. pengoordinasian rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait;
- o. pengoordinasian penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban;
- p. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang Anggaran dan Perbendaharaan; dan

- q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 1

Subbidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran

Pasal 9

- (1) Subbidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan dan menyiapkan bahan dalam rangka perencanaan dan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran menyelenggarakan fungsi:
  - a. perencanaan kegiatan dan anggaran Subbidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran;
  - b. penyiapan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan dan penyusunan anggaran;
  - c. pelaksanaan kaji ulang hasil verifikasi anggaran pendapatan, anggaran belanja daerah dan pembiayaan daerah;
  - d. penyusunan anggaran belanja daerah;
  - e. penyiapan bahan pembinaan teknis pengelolaan anggaran belanja daerah;
  - f. penyiapan bahan kajian investasi daerah dalam rangka penyertaan modal;
  - g. penyiapan petunjuk teknis penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
  - h. penyiapan bahan penyusunan rancangan KUA dan PPAS berikut perubahannya;
  - i. penyiapan bahan penyusunan dan pembahasan RKA/perubahan RKA SKPD dan PPKD;
  - j. penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan Walikota tentang penjabaran APBD berikut perubahannya;

- k. penyiapan bahan persetujuan dan pengesahan DPA/DPPA SKPD, BLUD dan PPKD;
- l. penyiapan bahan pembinaan penyusunan anggaran SKPD, BLUD dan PPKD;
- m. penyiapan bahan koordinasi penyusunan anggaran pendapatan daerah dan pendapatan PPKD;
- n. penyiapan bahan fasilitasi tugas Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
- o. penyiapan bahan penyusunan rancangan naskah perjanjian hibah daerah dalam bentuk uang yang dalam kewenangannya;
- p. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Subbidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran; dan
- q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 2  
Subbidang Administrasi Anggaran

Pasal 10

- (1) Subbidang Administrasi Anggaran mempunyai tugas melaksanakan dan menyiapkan bahan pelaksanaan administrasi anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Administrasi Anggaran menyelenggarakan fungsi:
  - a. perencanaan kegiatan dan anggaran Subbidang Administrasi Anggaran;
  - b. penyiapan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis administrasi anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
  - c. pendokumentasian dan pendistribusian APBD dan perubahan APBD;
  - d. pemrosesan pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran dan dokumen pelaksanaan perubahan anggaran;

- e. pendokumentasian dan pendistribusian naskah perjanjian hibah daerah dalam bentuk uang yang dalam kewenangannya;
- f. pembukuan dan pengadministrasian penerimaan dan pengeluaran daerah;
- g. penyusunan dan pembuatan laporan realisasi pengeluaran kas berdasarkan SP2D;
- h. pemrosesan penerbitan SPD Perangkat Daerah, BLUD dan PPKD serta restitusi/pengembalian kelebihan penerimaan;
- i. penyiapan bahan pelaksanaan pinjaman dan pemberian penjaminan atas nama Pemerintah Daerah;
- j. pelaksanaan pengaturan dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
- k. pengumpulan dan pengolahan data anggaran kas;
- l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Subbidang Administrasi Anggaran; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 3  
Subbidang Perbendaharaan

Pasal 11

- (1) Subbidang Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan dan menyiapkan bahan dalam rangka penyelenggaraan perbendaharaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi:
  - a. perencanaan kegiatan dan anggaran Subbidang Perbendaharaan;
  - b. pelaksanaan pengelolaan kas daerah;
  - c. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penatausahaan penerimaan kas;

- d. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan pengeluaran kas dan pertanggungjawaban;
- e. penyusunan laporan penerimaan dan pengeluaran kas serta rekonsiliasi data penerimaan kas dalam rangka penyusunan posisi kas;
- f. penyusunan dan penyediaan laporan aliran kas secara periodik;
- g. penelitian dokumen atau bukti penerimaan uang daerah dan penatausahaan dana transfer daerah sesuai dengan rekening kas umum daerah;
- h. pelaksanaan analisis pemberdayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas dalam rangka penerimaan daerah;
- i. pelaksanaan register SPM dan SP2D atas belanja Perangkat Daerah, pengendalian atas pagu anggaran dan penelitian dokumen SPM;
- j. pelaksanaan proses penerbitan SP2D dan daftar pengantar SP2D serta pendistribusian lembar SP2D;
- k. pelaksanaan proses penerbitan SKPP;
- l. penyimpanan uang daerah;
- m. penelitian, koreksi dan pemberian persetujuan pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan gaji dan non gaji;
- n. pengadministrasian pemungutan dan pemotongan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan rekonsiliasi pengeluaran kas berdasarkan SP2D dalam rangka pengendalian kas;
- o. pemantauan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
- p. pelaksanaan penagihan piutang daerah yang bukan tugas dan fungsi bidang atau Perangkat Daerah lain;

- q. pelaksanaan pembayaran berdasarkan permintaan Pejabat Pengguna Anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
- r. penyiapan bahan pembinaan perbendaharaan;
- s. pelaksanaan pengolahan penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- t. pelaksanaan kaji ulang hasil verifikasi penerimaan dan pengeluaran anggaran kas daerah;
- u. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Subbidang Perbendaharaan; dan
- v. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

Bagian Keempat  
Bidang Akuntansi dan Penatausahaan Aset Daerah

Pasal 12

- (1) Bidang Akuntansi dan Penatausahaan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan program dan kegiatan perencanaan di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan Daerah, pendataan dan pengamanan aset Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Akuntansi dan Penatausahaan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan program Bidang Akuntansi dan Penatausahaan Aset Daerah berdasarkan perencanaan Strategis BKAD;
  - b. pengoordinasian pembukuan pendapatan dan belanja;
  - c. pelaksanaan koordinasi dan konsolidasi seluruh laporan keuangan Perangkat Daerah, BLUD dan PPKD dalam rangka penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
  - d. pengoordinasian kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;



- e. penyusunan tanggapan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- f. pelaksanaan rekonsiliasi realisasi pendapatan dan belanja serta pembiayaan dalam rangka penyusunan laporan keuangan daerah;
- g. penyusunan analisis laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- h. penyusunan kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintah Daerah;
- i. penyusunan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah Daerah;
- j. pelaksanaan verifikasi dan pengujian atas bukti memorial;
- k. pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi tentang penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah sesuai sistem akuntansi pemerintah daerah;
- l. penyiapan bahan pengelolaan utang/pinjaman dan piutang daerah yang dalam kewenangannya;
- m. penyusunan sistem dan prosedur penatausahaan dan pengamanan BMD;
- n. pengoordinasian penyusunan rencana kebutuhan BMD berikut perubahannya;
- o. pengoordinasian administrasi penatausahaan BMD;
- p. pelaksanaan pelaksanaan penatausahaan BMD;
- q. penyuluhan pemanfaatan tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang tidak dalam penguasaan Pengguna Barang;
- r. pengembangan potensi pemanfaatan BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang dimiliki/dikuasai Pemerintah Daerah yang tidak dalam penguasaan Pengguna Barang;
- s. pengoordinasian dan pelaksanaan pembinaan pengelolaan BMD;

- t. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang Akuntansi dan Penatausahaan Aset Daerah; dan
- u. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 1  
Subbidang Akuntansi dan Pelaporan

Pasal 13

- (1) Subbidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Akuntansi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:
  - a. perencanaan kegiatan dan anggaran Subbidang Akuntansi dan Pelaporan;
  - b. penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran kas Daerah;
  - c. pemantauan atas pengikhtisarkan penerimaan kas dan non kas yang dilakukan oleh Perangkat Daerah;
  - d. penyiapan bahan penyesuaian atas transaksi non kas;
  - e. pelaksanaan konsolidasi laporan realisasi berdasarkan laporan pengeluaran Perangkat Daerah non BLUD dan BLUD, dan PPKD secara periodik (bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan);
  - f. pelaksanaan konsolidasi laporan keuangan BLUD ke dalam laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
  - g. pelaksanaan penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran;
  - h. pelaksanaan verifikasi, analisa dan koreksi terhadap kesalahan realisasi penerimaan dan pengeluaran (bukti memorial);

- i. penyiapan bahan pembinaan, sosialisasi tentang penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah sesuai sistem akuntansi Pemerintah Daerah;
- j. penyiapan bahan penyusunan kebijakan serta sistem dan prosedur akuntansi penerimaan dan pengeluaran;
- k. penyusunan laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan;
- l. pelaksanaan posting atas pengeluaran dan ikhtisar laporan keuangan BUMD;
- m. penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- n. penyiapan bahan untuk tanggapan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- o. penyiapan bahan tindak lanjut hasil evaluasi rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- p. penyiapan bahan pembinaan/bimbingan teknis pembukuan anggaran penerimaan dan pengeluaran kas daerah, serta penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- q. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Subbidang Akuntansi dan Pelaporan; dan
- r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 2  
Subbidang Pendataan Aset Daerah

Pasal 14

- (1) Subbidang Pendataan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan pendataan dan evaluasi aset Daerah.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Pendataan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi:
- a. perencanaan kegiatan dan anggaran Subbidang Pendataan Aset Daerah;
  - b. penyiapan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan BMD dan rencana kebutuhan pemeliharaan BMD;
  - c. penyiapan bahan penyusunan dan evaluasi Standar Kebutuhan dan Standar Barang;
  - d. penyiapan bahan usulan rencana kebutuhan BMD berikut perubahannya;
  - e. penyiapan bahan penyusunan Laporan BMD Semesteran dan Tahunan;
  - f. penyiapan bahan pelaksanaan rekonsiliasi BMD Triwulanan;
  - g. penyiapan bahan pengembangan sistem dan pemutakhiran data informasi BMD;
  - h. penyiapan bahan konsolidasi dan sinkronisasi data BMD;
  - i. penyiapan bahan pelaksanaan inventarisasi BMD;
  - j. penyusunan sistem dan prosedur penatausahaan BMD berkaitan dengan pembukuan, inventarisasi dan pelaporan BMD;
  - k. pelaksanaan administrasi penatausahaan BMD;
  - l. pelaksanaan pembinaan penatausahaan BMD;
  - m. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Subbidang Pendataan Aset Daerah; dan
  - n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 3  
Subbidang Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian  
Aset Daerah

Pasal 15

- (1) Subbidang Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka pengawasan dan pengendalian pemanfaatan aset Daerah.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian Aset Daerah menyelenggarakan fungsi:
- a. perencanaan kegiatan dan anggaran Subbidang Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian Aset Daerah;
  - b. penyuluhan pemanfaatan tanah aset Pemerintah Daerah yang tidak dalam penguasaan Pengguna Barang;
  - c. penyiapan bahan dan dokumen Barang Milik Daerah untuk pencatatan dalam neraca Daerah;
  - d. penyiapan bahan pembinaan pengawasan dan pengendalian pengelolaan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/bangunan yang tidak dalam penguasaan pengguna barang;
  - e. penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian pengelolaan BMD selain tanah dan/bangunan;
  - f. pelaksanaan analisis/penelaahan hasil pembinaan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan BMD;
  - g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi subbidang Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian Aset Daerah; dan;
  - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

Bagian Kelima  
Bidang Pemanfaatan Aset Daerah

Pasal 16

- (1) Bidang Pemanfaatan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan program dan kegiatan di bidang penggunausahaan, pemindahtanganan, penghapusan, penyelesaian sengketa, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan aset Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemanfaatan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan program Bidang Pemanfaatan Aset Daerah berdasarkan perencanaan strategis BKAD;

- b. pengoordinasian penyiapan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan BMD;
- c. pengoordinasian hasil penilaian BMD;
- d. pelaksanaan penelitian dokumen usulan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan dan penghapusan BMD;
- e. pelaksanaan analisis penggunausahaan aset Daerah;
- f. penagihan terhadap pemanfaatan BMD yang tidak dalam penguasaan Pengguna Barang;
- g. perencanaan pengelolaan tanah dan/atau bangunan yang dikuasai dan/atau menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang diusulkan oleh orang dan/atau badan hukum sesuai rencana tata ruang wilayah;
- h. pengoordinasian penyelesaian perselisihan pemanfaatan tanah dan/atau bangunan yang dikuasai Pemerintah Daerah;
- i. pengoordinasian penyelesaian perselisihan pemanfaatan tanah dan/atau bangunan untuk pembangunan Pemerintah Daerah;
- j. pengoordinasian pengamanan dan pemeliharaan BMD yang tidak dalam penguasaan pengguna barang;
- k. pengoordinasian pengamanan fisik, administrasi dan hukum BMD
- l. pengoordinasian pelayanan pemakaian kekayaan BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang menjadi kewenangannya; penyusunan sistem dan prosedur penatausahaan dan pengamanan BMD
- m. pengoordinasian pengamanan dan pemeliharaan BMD yang tidak dalam penguasaan pengguna barang
- n. pengoordinasian pengamanan fisik, administrasi dan hukum BMD
- o. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang Pemanfaatan Aset Daerah; dan
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 1  
Subbidang Penggunausahaan Aset Daerah

Pasal 17

- (1) Subbidang Penggunausahaan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan penggunausahaan Aset Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Penggunausahaan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi:
  - a. perencanaan kegiatan dan anggaran Subbidang Penggunausahaan Aset Daerah;
  - b. penyiapan bahan pemanfaatan BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak dalam penguasaan Pengguna Barang;
  - c. penyiapan bahan dan dokumen pemanfaatan aset daerah untuk pencatatan dalam neraca daerah;
  - d. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pemanfaatan aset daerah yang tidak dalam penguasaan pengguna barang
  - e. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan pemanfaatan BMD yang tidak dalam penguasaan Pengguna Barang;
  - f. penyiapan bahan perencanaan pengelolaan tanah dan/atau bangunan yang dikuasai dan/atau menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang diusulkan oleh orang dan/atau badan hukum sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah;
  - g. penyiapan bahan penagihan terhadap pemanfaatan aset daerah yang tidak dalam penguasaan pengguna barang
  - h. penyiapan bahan pelaksanaan pengembangan potensi pemanfaatan tanah dan/atau bangunan yang dalam kewenangannya
  - i. penyiapan bahan pelaksanaan pengembangan potensi pemanfaatan tanah dan/atau bangunan yang dikuasai Pemerintah Daerah;
  - j. penyiapan bahan dalam rangka kerja sama pemanfaatan BMD yang tidak dalam penguasaan pengguna barang;



- k. pelaksanaan proses pelayanan pemakaian kekayaan Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang menjadi kewenangannya;
- l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Subbidang Penggunausahaan Aset Daerah; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

#### Paragraf 2

### Subbidang Pemindahtanganan dan Penghapusan Aset Daerah

#### Pasal 18

- (1) Subbidang Pemindahtanganan dan Penghapusan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka pemindahtanganan, penghapusan dan penyelesaian sengketa aset Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Pemindahtanganan dan Penghapusan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi:
  - a. perencanaan kegiatan dan anggaran Subbidang Pemindahtanganan dan Penghapusan Aset Daerah;
  - b. penyiapan bahan penghitungan dalam rangka usulan pembebasan tanah bagi pelaksanaan pembangunan yang dalam kewenangannya;
  - c. penyiapan bahan petunjuk teknis terkait pelaksanaan proses penyelesaian pengadaan tanah untuk kegiatan pembangunan Pemerintah Daerah;
  - d. penyiapan bahan penaksiran BMD yang akan dimanfaatkan oleh pihak lain;
  - e. penyiapan bahan pengoordinasian penyelesaian perselisihan pemanfaatan BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak dalam penguasaan Pengguna Barang;
  - f. penyiapan bahan penelitian usulan status penggunaan BMD dari Pengguna Barang;
  - g. penyiapan bahan penilaian dan pemindahtanganan BMD;

- h. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis penilaian pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan BMD;
- i. penyiapan bahan pelaksanaan penghapusan BMD;
- j. penyiapan dokumen hasil penilaian BMD dalam rangka pemanfaatan BMD yang tidak dalam penguasaan pengguna barang;
- k. penyiapan bahan pelaksanaan pemusnahan BMD
- l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Subbidang Pemindahtanganan dan Penghapusan Aset Daerah; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

### Paragraf 3

#### Subbidang Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Daerah

#### Pasal 19

- (1) Subbidang Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi:
  - a. perencanaan kegiatan dan anggaran Subbidang Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Daerah;
  - b. penyiapan bahan pensertipikatan tanah milik/dikuasai Daerah;
  - c. penyiapan bahan pelaksanaan pengamanan BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak dalam penguasaan Pengguna Barang;
  - d. penyiapan bahan pelaksanaan pengembangan Sistem Informasi Manajemen Aset Tanah dan Bangunan;
  - e. penyiapan bahan konsolidasi dan sinkronisasi data Tanah, Gedung dan Bangunan;
  - f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pengamanan BMD;

- g. pelaksanaan pengelolaan arsip Tanah, Gedung dan Bangunan;
- h. pelaksanaan pengelolaan dokumen asli kepemilikan BMD;
- i. penyiapan bahan pemeliharaan BMD berupa tanah dan bangunan yang tidak dalam penguasaan Pengguna Barang;
- j. penyiapan bahan pelaksanaan administrasi pengamanan dan pemeliharaan BMD;
- k. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Subbidang Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Daerah; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

Bagian Keenam  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 20

Di lingkungan BKAD dapat dibentuk jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 21

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

Pasal 22

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan dan analisis beban kerja dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
TATA KERJA

Pasal 23

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi, serta Kepala Subbagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan internal maupun antar perangkat daerah dalam Pemerintah Daerah, antar instansi vertikal kementerian serta unsur pemerintah daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.
- (2) Pejabat fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbidang, atau Kepala Subbagian yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional.
- (3) Kedudukan Pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peta jabatan.

Pasal 24

Setiap unsur pimpinan pada BKAD wajib melaksanakan tugas dan fungsi, pengawasan melekat dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada masing-masing pimpinan secara berjenjang.

Pasal 25

- (1) Kepala Badan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Kepala Subbagian dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (4) Kepala Subbidang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Bidang.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka Peraturan Walikota Malang Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 31 Desember 2019

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

Diundangkan di Malang  
pada tanggal 31 Desember 2019

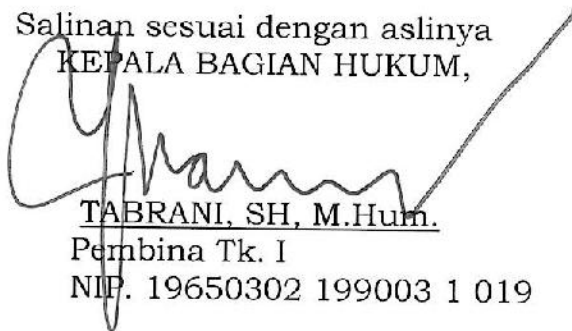
SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

WASTO

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2019 NOMOR 78

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



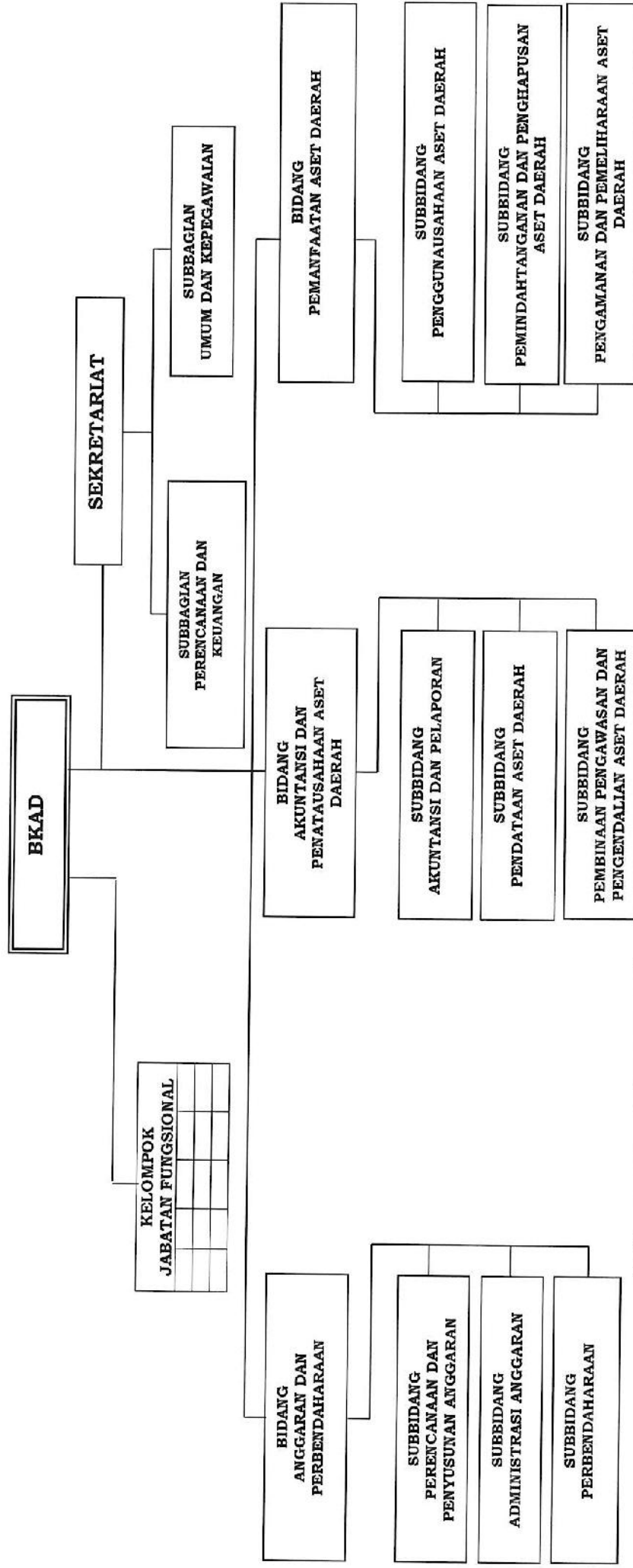
TABRANI, SH, M.Hum.

Pembina Tk. I

NIP. 19650302 199003 1 019

LAMPIRAN  
 PERATURAN WALIKOTA MALANG  
 NOMOR : 78 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS  
 DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN  
 KEUANGAN DAN ASET DAERAH

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH



Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

*[Signature]*  
 TABRANI, SH, M.Hum.  
 Pembina Tk. I  
 NIP. 19650302 199003 1 019

WALIKOTA MALANG,  
 ttd.  
 SUTIAJI